BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengoptimalisasikan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di dinas lingkungan hidup tertuang pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki wewenang menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan penyelenggaraan negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
2. Sementara itu terkait dengan upaya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi adanya Maladministrasi di dinas lingkungan hidup Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada keasistenan bidang pencegahan harus mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya sesuai pada pasal 2 ayat (3) yang dimana ada 3 tahap dalam mencegah adanya maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya yaitu melakukan deteksi, analisis, dan perlakuan pelaksanaan saran.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan kewenangan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dinas lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Karawang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat harus lebih meningkatkan regulasi dalam memberikan rekomendasi yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya dalam mencegah adanya maladministrasi di dinas lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Karawang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh keasistenan bidang pencegahan dapat mendeteksi lebih awal untuk mengetahui adanya maladministrasi yang dilakukan oleh pihak petugas pelaksana penyelenggara pelayanan publik dinas lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Karawang.